



**KABUPATEN
BENGKAYANG**

2022

**CATATAN
ATAS
LAPORAN
KEUANGAN**

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



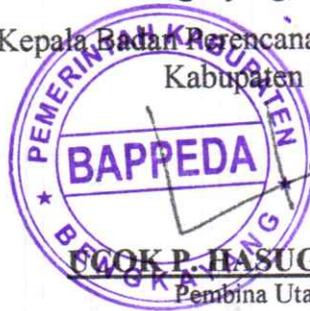
KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2022 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan data-data yang ada serta tepat pada waktunya. Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah disusun dalam Rangka Penerapan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Harapan kami Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah ini berguna sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Bengkayang, 01 Maret 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah



BOK P. HASUGIAN, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda IVc
NIP. 19750828 199603 1 002



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3
BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA	7
3.1 Ekonomi Makro	7
3.2 Kebijakan Keuangan	7
3.3 Program Pencapaian Target Kinerja	7
BAB IV IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	11
4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	11
4.2 Hambatan dan Kendala	11
BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
5.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	13
5.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan	13
5.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan	14
5.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	17
5.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO	17
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas	19
BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	20
6.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	20
6.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi	28
BAB VII PENUTUP	30



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
SKPD : 5-01.5-05.0-00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA DAERAH	7.402.753.634,00	6.881.462.873,00	92,96	6.641.026.041,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.163.146.434,00	6.656.212.873,00	92,92	6.430.996.041,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.048.543.724,00	2.989.291.134,00	98,06	2.831.313.417,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.114.602.710,00	3.666.921.739,00	89,12	3.599.682.624,00
5.2	BELANJA MODAL	239.607.200,00	225.250.000,00	94,01	210.030.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	239.607.200,00	225.250.000,00	94,01	210.030.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(7.402.753.634,00)	(6.881.462.873,00)	0	(6.641.026.041,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.402.753.634,00)	(6.881.462.873,00)	0	(6.641.026.041,00)





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
NERACA

Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 5-01.5-05.0-00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit : 5-01.5-05.0-00.01.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit : 5-01.5-05.0-00.01.000.0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	1.910.656.455,20	1.710.601.820,20
Gedung dan Bangunan	198.435.000,00	198.435.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.656.300,00	50.656.300,00
Aset Tetap Lainnya	700.000,00	700.000,00
Akumulasi Penyusutan	(1.620.335.705,20)	(1.485.552.187,70)
JUMLAH ASET TETAP	540.112.050,00	474.840.932,50
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	110.020.255,00	110.020.255,00
Aset Lain-lain	9.428.000,00	9.428.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(110.020.255,00)	(110.020.255,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	9.428.000,00	9.428.000,00
JUMLAH ASET	549.540.050,00	484.268.932,50
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	16.922.232,00	339.500,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16.922.232,00	339.500,00
JUMLAH KEWAJIBAN	16.922.232,00	339.500,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	532.617.818,00	483.929.432,50
JUMLAH EKUITAS	532.617.818,00	483.929.432,50
JUMLAH EKUITAS	532.617.818,00	483.929.432,50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	549.540.050,00	484.268.932,50





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan Akhir tahun 2022 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun adalah menyajikan informasi mengenai kinerja, kemampuan dan posisi keuangan dalam satu tahun serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.

1.2. Struktur Organisasi

1. Pembentukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 11 tahun 2016 dengan revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Bengkayang.

2. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai Berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat yang terdiri dari
 - Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan ;
- c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang terdiri dari;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pengendalian;
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ;
- f. Bidang Perencanaan< Pengendalian dan Penelitian dan Pembangunan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor :11 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten bengkayang Mempunyai tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. yang memuat penyusunan rencana makro dibidang sosial budaya, ekonomi, fisik dan prasarana serta tugas pengendalian program pembangunan, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati sesuai lingkup tugasnya.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022*

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan, Menetapkan dan Mendiseminasikan target kinerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten bengkayang;
- b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten bengkayang;
- c. Menetapkan laporan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang;
- d. Menyusun rumusan kebijakan di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan;
- e. Menetapkan kebijakan di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan ;
- f. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat di bawahnya dan ;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi;



BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka pengelolaan Keuangan, unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah No. 11 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban untuk menyusun laporan realisasi anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD yang terdiri dari :
 - Laporan Semester, yaitu merupakan laporan keuangan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2022
 - Laporan Akhir Tahun, yaitu merupakan laporan keuangan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022.
- b. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Bappeda selaku Kepala SKPD yang berwenang dalam penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Bappeda.
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yaitu Sekretaris Bappeda. PPK mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ditetujui oleh PPTK;
 - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - Melakukan verifikasi SPP;
 - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran;
 - Melakukan Akuntansi SKPD;
 - Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. PPTK mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - Pengendalian pelaksana kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya kepada Bupati Bengkayang UP. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - Menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang dikelolanya;
 - Mengkonsultasikan rencana pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang yang membawahi;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala bidang yang membawahi minimal pada minggu pertama bulan berikutnya;
 - Bertanggungjawab atas dokumen pertanggungjawaban dan keuangan yang dikelolanya.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022*

- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. PPKom mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - menandatangani Kontrak;
 - melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- e. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk berdasarkan pengajuan kepala SKPD dan ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Bappeda. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Memeriksa SPP/ SPM (UP/TU/GU/LS) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan pencairan untuk pelaksanaan kerja;
 - Membayarkan pencairan dana berdasarkan SP2D yang terbit untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - Menyimpan dana pada Bank dan Kas pada Bendahara untuk memudahkan apabila diperlukan;
 - Memeriksa kelengkapan persyaratan bukti-bukti tagihan untuk melakukan pembayaran;
 - Membayarkan atas bukti-bukti pengeluaran kegiatan yang sudah lengkap dan memadai yang tersedia kredit anggarannya;
 - Menarik pemotongan pajak pph dan PPN berdasarkan dana yang telah dikeluarkan untuk disetorkan ke Kas Daerah;
 - Membuat Buku Kas Umum Pengeluaran sesuai dana yang telah dikeluarkan untuk dicatat sebagai transaksi belanja;
 - Membuat Buku Pembantu Simpanan Bank berdasarkan saldo SP2D yang telah dicairkan/ belum dibelanjakan dari rekening Bank Bendahara Pengeluaran untuk tertib administrasi keuangan;
 - Membuat Buku Pembantu Kas Tunai berdasarkan saldo SP2D yang telah dicairkan/ belum dibelanjakan dari rekening kas tunai bendahara pengeluaran untuk tertib administrasi keuangan;
 - Membuat Buku Pembantu Panjar berdasarkan jumlah uang yang diberikan sebagai panjar pada pihak tertentu untuk melaksanakan kegiatan;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi serta penilaian kinerja oleh atasan.
- f. Pembantu Bendahara adalah pegawai yang ditunjuk berdasarkan pengajuan kepala Bappeda dan ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk membantu dalam pekerjaan bendahara pengeluaran. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022*

- Menyiapkan surat pengantar pengajuan SPP-UP/SPP-GU, ringkasan SPP-UP, SPP-GU, rincian penggunaan dana SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS/Gaji/Tunjangan, SPP-LS barang/Jasa, ringkasan dan rincian penggunaan dana SPP-LS barang/jasa sebagai dasar pencairan uang;
 - Menyiapkan surat pernyataan pengguna anggaran dan surat keterangan penjelasan keperluan pengisian tambahan Uang Persediaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengeluaran uang;
 - Menyiapkan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS untuk pengeluaran uang;
 - Membuat SPP dan SPM UP/TU/GU/LS berdasarkan kegiatan untuk pengeluaran uang;
 - Mengajukan SPP-UP/TU/GU/LS dan SPM UP/TU/GU/LS untuk penerbitan SP2D oleh BUD;
 - Menyiapkan kartu kendali kegiatan berdasarkan pengeluaran kegiatan untuk tertib administrasi keuangan;
 - Merekap sisa anggaran per triwulan berdasarkan pengeluaran kegiatan untuk tertib administrasi keuangan;
 - Meneliti dokumen kontrak dan kelengkapannya dan kebenaran tagihan atas kwitansi dan pajak berdasarkan pengeluaran kegiatan untuk tertib administrasi keuangan;
 - Mengarsipkan dokumen dan menyimpan dokumen keuangan berdasarkan kegiatan untuk memudahkan dalam pencarian dokumen jika diperlukan;
 - Membuat Berita Acara Pemeriksa Kas berdasarkan pengeluaran kegiatan untuk tertib administrasi keuangan;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi serta penilaian kinerja oleh atasan.
- g. Bendahara Gaji adalah Pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan penatausahaan pengelolaan gaji dan mempertanggungjawabkannya kepada pengguna anggaran melalui bendahara pengeluaran. Bendahara Gaji mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Membuat telaahan pengajuan SPP gaji pegawai untuk diajukan kepada atasan;
 - Membuat daftar permintaan gaji bulanan dan kekurangannya sesuai dengan jumlah pegawai yang ada untuk diajukan permintaan kepada BPKAD;
 - Menghitung pinjaman kredit pegawai untuk disetorkan kepada Bank dalam waktu tertentu atau sesuai perjanjian agar tidak terjadi keterlambatan;
 - Menyampaikan SPP gaji pegawai yang telah dilegalisir atasan kepada BPKAD untuk mendapatkan pencairan sesuai dengan anggaran yang tersedia;
 - Mengeluarkan pencairan SPP gaji pegawai di Kas Daerah atau Bank yang telah ditunjuk sesuai dengan jumlah permintaan yang diajukan;
 - Menghitung sisa gaji bersih dan memasukannya ke dalam amplop untuk diserahkan kepada pegawai sesuai dengan jumlah gaji yang ditandatanganinya;
 - Mengolah daftar gaji bulan lalu, buku pengamatan gaji, blanko daftar gaji dan blanko rekapitulasi untuk pembuatan konsep gaji berikutnya;
 - Menganalisis perubahan gaji pegawai dalam buku pengamatan gaji berdasarkan surat keputusan perubahan status kepangkatan gaji berkala dan KPU untuk penyusunan konsep;
 - Membuat perubahan gaji pegawai dalam buku pengamatan gaji berdasarkan SK perubahan status kepangkatan gaji berkala dan KP4 untuk bahan penyusunan konsep gaji berikutnya;



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022*

- Membuat konsep surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji bagi pegawai yang pindah tugas, meninggal dunia atau pensiun berdasarkan data pegawai yang bersangkutan;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi serta penilaian kinerja oleh atasan.
- h. Penyimpan Barang adalah Pegawai yang ditunjuk berdasarkan pengajuan kepala Bappeda dan ditetapkan dengan keputusan Bupati ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan
- i. mengeluarkan barang inventaris di setiap SKPD. Penyimpan Barang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
 - Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
 - Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 - Mencatat barang milik daerah yang diterima kedalam buku/kartu barang;
 - Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan;
 - Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stok/persediaan barang milik daerah kepada kepala SKPD;
 - Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. Pengurus Barang adalah Pegawai yang ditunjuk berdasarkan pengajuan kepala Bappeda dan ditetapkan dengan keputusan Bupati disertai tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/ Unit Kerja. Pengurus Barang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Mencatat seluruh barang milik daerah yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodifikasi dan pengelolaan barang milik daerah;
 - Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Sementara (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dan Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola;
 - Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
 - Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
 - Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok sesuai dengan bidang tugasnya.



BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

3.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat ukur keberhasilan kerja ekonomi suatu daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

3.2 Kebijakan Keuangan

Dalam upaya mewujudkan visi misi tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang adalah di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

3.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai 4 (empat) program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya, kegiatan-kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah.
8. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
9. Kegiatan Analisis data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan daerah.
10. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia.
12. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
13. Kegiatan Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
14. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
15. Kegiatan Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan
16. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.



Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022

Tabel 3.3
Realisasi dan persentasi subkegiatan BAPPEDA Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase %	Sisa Anggaran
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.978.400	3.651.200	91,78%	327.200
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.458.000	1.356.000	93,00%	102.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.561.000	2.3390.130	93,33%	170.870
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.251.000	2.786.000	85,70%	465.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.345.200	3.328.800	99,51%	16.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.926.200	4.546.800	92,30%	379.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.676.000	3.963.500	84,76%	712.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.651.000	2.623.360	98,96%	27.640
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.406.900	3.208.600	94,18%	198.300
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.500.000	48.296.200	99,58%	203.800
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Bangunan kantor	6.990.000	4.953.000	70,86%	2.037.000
Penyediaan alat dan perlengkapan kantor	105.314.600	104.079.451	98,83%	1.235.149
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.008.400	10.140.000	77,95%	2.868.400
Penyediaan Logistik Kantor	68.980.000	66.668.000	96,65%	2.312.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.529.000	60.161.500	99,39%	367.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.520.000	11.500.000	99,83%	20.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.383.000	308.187.827	99,94%	195.173
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	294.898.800	281.750.000	95,54%	13.148.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	7.700.000	96,25%	300.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.019.136	80.127.016	79,32%	20.892.120
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245.020.890	210.550.226	85,93%	34.470.664
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.775.000	103.842.400	72,23%	39.932.600
Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lain	201.640.000	0,00	0,00	201.640.000
Analisis Kondisi Daerah Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	44.618.700	43.333.300	97,12%	1.285.400



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022**

Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	63.966.000	62.782.100	98,15%	1.183.900
Pelaksanaan Konsultasi Publik	13.464.200	12.559.800	93,28%	904.400
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	10.004.900	9.773.200	97,68%	231.700
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	19.431.800	19.131.500	98,45%	300.300
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	15.324.300	14.432.096	94,18%	892.204
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	378.671.400	357.801.527	94,49%	20.869.873
Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	413.009.944	391.978.100	94,91%	21.031.844
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	15.208.000	11.384.600	74,86%	3.823.400
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	172.134.100	156.288.070	90,79%	15.846.030
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPDP)	59.292.400	57.062.886	96,24%	2.229.514
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	28.975.800	26.998.775	93,18%	1.977.025
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pemerintahan	33.013.850	32.768.500	99,26%	245.350
Koordinasi dan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	52.116.800	51.509.400	98,83%	607.400
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPDP)	36.656.600	33.817.573	92,26%	2.839.027
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	33.140.000	27.787.500	83,85%	5.352.500
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25.920.000	25.195.850	97,21%	724.150
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	106.709.900	104.908.000	98,31%	1.801.900
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP)	37.589.500	36.971.400	98,36%	618.100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	27.912.880	22.438.500	80,39%	5.474.380
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	31.282.000	30.647.000	97,97%	635.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	40.889.500	35.296.400	86,32%	5.593.100



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022**

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	35.167.500	28.280.500	80,42%	6.887.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	26.166.000	26.139.400	99,90%	26.600
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	23.980.000	23.693.981	98,81%	286.019
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	41.176.000	36.743.371	89,23%	4.432.629
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD)	71.318.600	71.307.500	99,98%	11.100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.390.000	47.345.700	99,91%	44.300
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	33.390.000	33.385.300	99,99%	4.700
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	50.721.500	50.714.800	99,99%	6.700
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	43.616.000	43.589.900	99,94%	26.100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	33.833.000	33.592.500	99,29%	240.500
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	63.568.000	63.559.500	99,99%	8.500
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	199.500.000	199.315.000	99,91%	185.000
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	173.416.500	150.000.000	86,50%	23.416.500
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	117.329.000	113.007.400	96,32%	4.321.600
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	66.647.100	62.197.300	93,32%	4.449.800
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	19.825.500	18.623.500	93,94%	1.202.000
JUMLAH	4.354.209.800	3.892.171.739	89,39%	462.038.061

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada Laporan Keuangan Akhir Tahun kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang dalam hal realisasi anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.892.171.739,- atau sebesar 89,39%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut ini :

- 1) Hingga Laporan keuangan akhir tahun kegiatan yang terealisasi pada umumnya merupakan Belanja Langsung yang sifatnya rutinitas;
- 2) Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pihak ketiga yang sudah terlaksana pada laporan keuangan akhir tahun.



BAB IV

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA - SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 92%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang selama tahun 2022 dapat dirinci dalam tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
	- Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	7.402.753.634,00	6.881.462.873,00	92,96%
	- Belanja Operasi	7.163.146.434,00	6.656.212.873,00	92,92%
	- Belanja Modal	239.607.200,00	225.250.000,00	94,01%
	Jumlah Belanja	7.402.753.634,00	6.881.462.873,00	92,96%

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2022 sebesar Rp 6.881.462.873,- atau 92,96 % yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

4.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi pendapatan dan belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAP, DPAP) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022*

- c. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya gedung arsip, belum adanya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara dan banyaknya peralatan perkantoran yang rusak.
- d. Koordinasi dan sinkronisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan instansi dalam dan luar daerah kurang optimal.



BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

5.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yaitu basiskas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan di terima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan di akui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.



5.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut:

- 1) Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi;
- 4) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 5) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 6) Aset Tetap Tanah

Tanah dicatat dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangun tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.



- 7) **Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 8) **Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dicatat dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 9) **Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Instalasi**

Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, jaringan, dan instalasi di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
- 10) **Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya dicatat dengan harga perolehan, yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 11) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

 - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

 - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022*

- pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

12) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbedaharaan, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kemitraan dengan Pihak

Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset tak berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan piutang tidak tertagih (macet) juga termasuk dalam kelompok aset Lain-lain.

13) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga

Keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai



konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada saat pertama kali transaksi

berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

14) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bengkayang, yaitu selisih antara aset dan utang Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain: sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

5.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 4 tahun 2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

5.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan –LO beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periodesebelumnya. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu di bayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan

jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN OPERASIONAL**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
 SKPD : 5.01.5-05.0-00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Unit Organisasi : 5.01.5-05.0-00.01.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 5.01.5-05.0-00.01.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAWPENURUNAN	(%)
8	KEGIATAN OPERASIONAL				
	BEBAN DAERAH	6.847.157.352,50	6.586.236.423,50	260.920.929,00	3,96
8.1	BEBAN OPERASI	6.674.465.970,00	6.431.335.541,00	243.130.429,00	3,78
8.1.01	Beban Pegawai	3.005.873.866,00	2.831.652.917,00	174.220.949,00	6,15
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	3.668.921.739,00	3.599.692.624,00	67.239.115,00	1,87
8.1.08	Beban Lain-lain	1.670.365,00	0,00	1.670.365,00	0
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	172.691.382,50	154.900.882,50	17.790.500,00	11,49
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	167.456.275,00	149.665.775,00	17.790.500,00	11,89
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.968.700,00	3.968.700,00	0,00	0,00
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.266.407,50	1.266.407,50	0,00	0,00
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	(6.847.157.352,50)	(6.586.236.423,50)	(260.920.929,00)	0
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(6.847.157.352,50)	(6.586.236.423,50)	(260.920.929,00)	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6.847.157.352,50)	(6.586.236.423,50)	(260.920.929,00)	0
	POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(6.847.157.352,50)	(6.586.236.423,50)	(260.920.929,00)	0
	SURPLUS/DEFISIT-DLO	(6.847.157.352,50)	(6.586.236.423,50)	(260.920.929,00)	0

DATA KEJAYANAN PUBLIK

BAPPEDA
 KABUPATEN BENGKAYANG
 Kepala BAPPEDA KAB. BENGKAYANG
 DR. OK P. HASLIGIAN, S.STP., M.Si
 NIP. 197508281996031002
 Bengkulu, 28 Februari 2023



Pengakuan

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
 - 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - 2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- b. Pada saat pendapatan direalisasi,
yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil.
- b) Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang berkenaan.
- c) Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternative yaitu :

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan
3. pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
4. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.



5. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
6. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas saldo akhir ekuitas Bappeda Kab. Bengkayang.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal.

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dampak kumulatif yang di sebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya, koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; perubahan nilai aset tetap karena evaluasi aset tetap ekuitas akhir.

Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada laporan perubahan ekuitas yang di atas suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 5-01.5-05.0-00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Unit
: 5-01.5-05.0-00.01.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit : 5-01.5-05.0-00.01.000.0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	483.929.432,50	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(6.847.157.352,50)	(6.586.236.423,50)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	14.382.865,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.881.462.873,00	6.376.196.591,00
EKUITAS AKHIR	532.617.818,00	(210.039.832,50)



Bengkayang, 28 Februari 2023
KEPALA BAPPEDA KAB. BENGKAYANG

[Signature]
BUDY P. HASUGIAN, S.STP., M.Si
NIP. 197508281996031002





BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1. ASET	549.540.050,00	484.268.932,50

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosialdimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang. Nilai Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari:

1. Aset Lancar	0,00	0,00
2. Investasi Jangka Panjang	0	0
3. Aset Tetap	540.112.050,00	474.840.932,50
4. Dana Cadangan	0,00	0,00
5. Aset Lainnya	9.428.000,00	9.428.000,00
Jumlah	549.540.050,00	484.268.932,50

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi penurunan nilai aset yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang .

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
2 ASET LANCAR	0,00	0,00

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian dan perbandingan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut;

1.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3.	Kas Di BLUD	0,00	0,00
4.	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
5.	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
6.	Kas Lainnya	0,00	0,00
7.	Setara Kas	0,00	0,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022**

8	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
9	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
10	Piutang Lainnya	0,00	0,00
11	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
12	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
13	Persediaan	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	0,00	0,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.1 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Tidak Terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 :		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Tidak Terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 :		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.3 Kas Di BLUD	0,00	0,00
Tidak Terdapat Saldo Kas Di BLUD per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.4 Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Tidak Terdapat Saldo Kas Di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.5 Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Tidak Terdapat Saldo Kas Di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.7 Kas Lainnya	0,00	0,00
Tidak Terdapat Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.8 Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Tidak ada Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.9 Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Tidak ada Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.10 Piutang Lainnya	0,00	0,00
Tidak ada Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.1 Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Tidak ada Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022**

1.12 Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00
 Tidak ada Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021
31 Desember 2022 31 Desember 2021

1.1 Persediaan 0,00 0,00

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan di bebaskan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri. Persediaan Barang dengan Bukti-bukti yang ada dalam kepengurusan barang terdapat persediaan Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	Kertas HPS F4.70 Gram				0,00
2	Map Gobi				0,00
3	Tinta Efsen				0,00
4	Amplop Putih Ukuran Panjang				0,00
5	Balpoint Pilot Baliner				0,00
<i>Total Jumlah Persediaan</i>					0,00

31 Desember 2022 30 Desember 2021

2. Investasi Jangka Panjang

Tidak ada Nilai Investasi Jangka Panjang posisi per 31 Desember 2022

3. ASET TETAP 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp.540.112.050,00 Rp.474.840.932,50

Nilai Aset tetap posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp.540.112.050,00 atau bertambah dibandingkan 31 Desember 2021 Rp. 474.840.932,50

Akun	Saldo 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2022
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.710.601.820,20	0,00	0,00	1.910.656.455,20
Gedung dan Bangunan	198.435.000,00	0,00	0,00	198.435.000,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	50.656.300,00	0,00	0,00	50.656.300,00



Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022

Aset Tetap Lainnya	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Koreksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.485.552.187,70)	0,00	0,00	(1.620.335.705,20)
Jumlah Aset Tetap	474.840.932,50	0,00		540.112.050,00

3.1 Tanah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	0,00	0,00
Tanah Sldo Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Posisi Per 31 Desember 2021 Rp. 0,00		
3.2 Peralatan dan Mesin	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	1.910.656.455,20	1.710.601.820,20
Saldo peralatan dan mesin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2022 Rp. 1.910.656.455,20		
3.3 Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	198.435.000,00	198.435.000,00
Saldo gedung dan bangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 198.435.000,00		
3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	50.656.300,00	50.656.300,00
Saldo jalan, jaringan dan instalasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2022 sebesar Rp .50.656.300,00		
3.5 Aset Tetap Lainnya	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	700.000,00	700.000,00
Saldo Aset Tetap Lainnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2022 sebesar Rp . 700.000,00		
3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	0,00	0,00
Saldo Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00.		
3.7 Akumulasi Penyusutan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	1.620.335.705,20	1.485.552.187,70
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 Rp. 1.485.552.187,70		
JUMLAH ASET TETAP	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	540.112.050,00	474.840.932,50
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 Rp. 540.112.050,00		
4. DANA CADANGAN	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	0,00	0,00
Saldo Dana Cadangan Posisi per 31 Desember 2022 adalah Rp. 0,00		



Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022

4.1 Dana Cadangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan Posisi per 31 Desember 2022 adalah Rp. 0,00

JUMLAH DANA CADANGAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan Posisi per 31 Desember 2022 adalah Rp. 0,00

5.2 ASET LAINNYA	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	9.428.000,00	9.428.000,00

Nilai Aset Lainnya Posisi per 31 Desember 2022 Rp. 9.428.000,-

Rincian Aset lainnya posisi per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	110.020.255,00	110.020.255,00
Lain-lain	9.428.000,00	9.428.000,00
Jumlah Aset Lainnya	9.428.000,00	9.428.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	9.428.000,00	9.428.000,00

5.3 Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	0,00	0,00

Nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 adalah Rp.0,00

5.4 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	0,00	0,00

Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 adalah Rp.0,00

5.5 Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	110.020.255,00	110.020.255,00

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah Rp. 110.020.255,00

5.6 Aset Lain-lain	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	9.428.000,00	9.428.000,00

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah Rp. 9.428.000,00

JUMLAH ASET LAINNYA	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	9.428.000,00	9.428.000,00

JUMLAH ASET	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	549.540.050,00	484.268.932,50

6 KEWAJIBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	16.922.232,00	339.500,00



Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

NO	Uraian	2022	2021
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
5	Utang Belanja	16.922.232,00	339.500,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16.922.232,00	339.500,00

6.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		16.922.232,00	339.500,00
	Saldo Kewajiban Jangka pendek Per 31 Desember 2022	Rp. 16.922.232,00	
6.2	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		0,00	0,00
	Saldo Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) Per 31 Desember 2022	Rp.0,00	
6.3	Utang Bunga	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		00,00	0,00
	Saldo Utang bunga lainnya Per 31 Desember 2022	Rp. 16.922.232,00	
6.4	Utang Pinjaman Jangka pendek	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		0,00	0,00
	Saldo bagian utang pinjaman jangka pendek Per 31 Desember 2022	Rp.0,00	
6.5	Bagian lancer utang jangka panjang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		0,00	0,00
	Saldo Bagian utang jangka Panjang Per 31 Desember 2022	Rp.0,00	
6.6	Pendapatan diterima di muka	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		0,00	0,00
	Saldo pendapatan diterima dimuka Per 31 Desember 2022	Rp.0,00	
6.7	Utang Belanja Gaji Tunjangan Fungsional Umum	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	An.	16.922.232,00	339.500,00
	1. Dr. Yan, S.Sos, M.Si	564.074,40	
	2. Antonius Yewin, SP., M.P	564.074,40	
	3. Emil Cans, S.STP., M.Si	564.074,40	
	4. Tumanggor Felix H.M., SE	564.074,40	
	5. Susandri Kisman, ST	564.074,40	
	6. Meyudi, S.STP, M.A.P	564.074,40	
	7. Lelen. A. S.Sos	564.074,40	
	8. Lepiana, S.Hut, M.P	564.074,40	
	9. Hery Sanjoyo, ST	564.074,40	



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022**

10.	Rosalia. S.TP	564.074,40
11.	Wartati, S.Sos	564.074,40
12.	Agustinus Syawal, ST., MT	564.074,40
13.	Vian Astara, ST	564.074,40
14.	Liu Linardi, SE	564.074,40
15.	Daroi Rosalina, S.P	564.074,40
16.	Theresia Sri Utami, SE	564.074,40
17.	Bernarda Briggita U, S.STP., M.A.P	564.074,40
18.	Tresia Dewi, SE	564.074,40
19.	Tripinaneti, SE	564.074,40
20.	Yohanes Bambang, SP	564.074,40
21.	M. Benny Syahputra, S.STP	564.074,40
22.	Marcelus, A.Md	564.074,40
23.	Brian Belly, S.STP	564.074,40
24.	Mariati, ST	564.074,40
25.	Sirah, S.A.P	564.074,40
26.	Dharma Fransisco, S.Ak	564.074,40
27.	Ryolla Zata Qisthina, S.P.W.K	564.074,40
28.	Gesfi Anugrah, A.Md	564.074,40
29.	Agustianus Hengki	564.074,40
30.	Widiastuti Ara	564.074,40
	Jumlah	<u>16.922.232</u>

6.8 Utang Jangka Pendek lainnya Per 31 Desember 2022 31 Desember 2021
0,00 0,00

7. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

No	Uraian	2022	2021
1	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
2	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
3	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
4	Utang kepada Lembaga Bukan bank	0,00	0,00
5	Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00

7.1 Utang kepada pemerintah pusat 31 Desember 2022 31 Desember 2021
0,00 0,00

Saldo kepada pemerintah pusat Per 31 Desember 2022 Rp.0,00

7.2 Utang kepada Lembaga keuangan Bank (LKB) 31 Desember 2022 31 Desember 2021
0,00 0,00

Saldo utang jangka panjang lainnya Per 31 Desember 2022 Rp.0,00



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022*

7.3 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	0,00	0,00
Saldo bagian lancar utang jangka panjang Per 31 Desember 2022	Rp.0,00	
7.4 JUMLAH KEWAJIBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	16.922.232,00	339.500,00
Saldo jumlah kewajiban Per 31 Desember 2022	Rp.0,00	
4.1 EKUITAS	31 Desember 2022	31 Desember 2021
.1	0,00	0,00
Sadlo Ekuitas per 31 Desember 2022	Rp.0,00	
- Ekuitas	532.617.818,00	483.929.432,50
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana	549.540.050,00	484.268.932,50



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022**

6.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. PENDAPATAN	0,00	0,00

Tidak ada anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2022

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2. BELANJA	7.402.753.634,00	6.881.462.873,00

2.1 BELANJA OPERASI	7.163.146.434,00	6.656.212.873,00
----------------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022

- Belanja Pegawai	3.048.543.724,00	2.989.291.134,00
- Belanja Barang dan Jasa	4.114.602.710,00	3.666.921.739,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	7.402.753.634,00	6.881.462.879,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2.1.1 Belanja Pegawai	3.048.543.724,00	2.989.291.134,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2.1.2 Belanja Barang	4.114.602.710,00	3.666.921.739,00

Jumlah tersebut merupakan Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Anggaran 2022	Realisasi 2022
1.	Belanja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Belanja Modal)	Rp. 239.898.800,-	Rp. 225.250.000,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.114.602.710,-	Rp. 3.666.921.739,-
3.	Belanja Pegawai	Rp. 3.048.543.724,-	Rp. 2.989.292.134,-
		Rp. 7.402.753.634,-	Rp. 6.881.462.873,-

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2.1.4 Belanja Hibah	0,00	0,00

Tidak ada anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun 2022

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3.2 BELANJA MODAL	239.607.200,00	225.250.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 berupa peralatan dan mesin



Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2022

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	0,00	0,00
Tidak ada anggaran dan realisasi Belanja Tanah Tahun 2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	239.607.200,00	225.250.000,00
Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022 Dengan rincian sebagai berikut:		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung	198.435.000,00	198.435.000,00
Tidak ada anggaran dan realisasi Belanja Bangunan dan Gedung 2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.656.300,00	50.656.300,00
Tidak ada anggaran dan realisasi Belanja Irigasi dan Jaringan Tahun 2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	700.000,00	700.000,00
Tidak ada anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.6 Belanja Aset Lainnya	700.000,00	700.000,00
Nilai Belanja Aset Lainnya Posisi 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
SURPLUS/DEFISIT	7.402.753.634,00	6.881.462.873,00
Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Surplus/Defisit Anggaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari:		
1 Jumlah Pendapatan	0,00	0,00
2 Jumlah Belanja	7.402.753.634,00	6.881.462.873,00
SURPLUS/ (DEFISIT)	7.402.753.634,00	6.881.462.873,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.402.753.634,00	6.881.462.873,00



B A B VII P E N U T U P

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidak berhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam penyampaian laporan Keuangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Bengkayang, 1 Maret 2023

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN BENGKAYANG



UCOK P. HASUGIAN, S.STP., M.Si
NIP.19750828199603 1 002